

ABSTRAK

SOLUSI STRATEGIS PENGATURAN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DALAM PENGELOLAAN BUMN

Shinta Danisa Ristita (2210622101), Muthia Sakti, Aurora Jillena Meliala

Prinsip BJR menetapkan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik, prinsip kehati-hatian, memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku serta mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Berbeda dengan perusahaan privat, perusahaan milik negara dalam hal ini BUMN dalam menjalankan usahanya terikat dengan sejumlah regulasi terkait pengelolaan negara. Karakteristik inilah yang terkadang menimbulkan ketakutan bagi direksi BUMN untuk mengambil keputusan dikarenakan adanya ketakutan bahwa keputusan bisnis yang diambil merupakan keputusan yang tidak tepat atau bahkan menimbulkan kerugian. Perbedaan pendapat dalam penerapan BJR, dimana seringkali BJR dihadapkan pada permasalahan kerugian negara pada BUMN. Perdebatan terkait kerugian BUMN dianggap sebagai kerugian negara ataupun bukan sebagai kerugian negara pada praktiknya masih berlangsung pada ruang peradilan. Fakta tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang meyakini bahwa kerugian BUMN atau anak perusahaan BUMN merupakan suatu kerugian negara, sehingga perbuatan direksi yang mengakibatkan kerugian tersebut menjadi suatu perbuatan pidana. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan penerapan hukumnya terkait penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi yang ditunjang dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu penerapan *Business Judgement Rules* kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Pendekatan yang digunakan penyusun adalah *pendekatan konseptual (conceptual approach)* dan pendekatan kasus (*Case approach*). Hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan bahwa Penerapan *Business Judgement Rule* Dalam Pengambilan Keputusan Pada Konteks Pengelolaan Bisnis BUMN yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada prakteknya dijumpai pada pembuktian tindak pidana korupsi khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Baik perbuatan melawan hukum pada hukum perdata maupun hukum pidana serta pengaturan pada UU PT secara jelas menyatakan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ada terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMN tersebut, yaitu dikarenakan Negara dalam hal pemanfaatan asset melalui BUMN memiliki asset yang mungkin belum dimanfaatkan secara penuh.

Kata Kunci: *Business Judgment Rules, Good Corporate Governance, Tindak Pidana Korupsi.*

ABSTRACT

STRATEGIC REGULATORY SOLUTIONS FOR IMPLEMENTING BUSINESS JUDGMENT RULE IN STATE-OWNED ENTERPRISE GOVERNANCE

Shinta Danisa Ristita (2210622101), Muthia Sakti, Aurora Jillena Meliala

The BJR principle stipulates that the Board of Directors of a company cannot be held responsible for losses arising from a decision-making action, if the action is based on good faith, the principle of prudence, paying attention to applicable laws and prioritizing the principles of good corporate governance (GCG). Unlike private companies, state-owned companies in this case BUMN in running their businesses are bound by a number of regulations related to state management. This characteristic is what sometimes causes fear for BUMN directors to make decisions because of the fear that the business decisions taken are inappropriate decisions or even cause losses. differences of opinion in the application of BJR, where BJR is often faced with the problem of state losses in BUMN. The debate regarding BUMN losses being considered as state losses or not as state losses in practice is still ongoing in the courtroom. This fact can be seen from several court decisions that believe that losses from BUMN or BUMN subsidiaries are state losses, so that the actions of directors that result in such losses become a criminal act. This study uses a form of juridical-normative research, namely research on written legal norms to answer problems regarding the regulation and application of law related to the enforcement of Corruption Crimes supported by literature studies relevant to the problems discussed, namely the application of Business Judgement Rules, then analyzed and concluded in writing. The approach used by the compiler is a conceptual approach and a case approach. The results of the research and discussion obtained that the Application of Business Judgement Rules in Decision Making in the Context of BUMN Business Management, namely the Enforcement of Corruption Crimes in practice is found in the proof of corruption, especially Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law which contains elements of unlawful acts. Both unlawful acts in civil law and criminal law as well as regulations in the PT Law clearly state acts that cause losses. In the event of an alleged corruption crime in the BUMN company, this is because the State in terms of asset utilization through BUMN has assets that may not have been fully utilized.

Keywords: *Business Judgment Rules, Corruption Crime, Good Corporate Governance.*